

Pengaruh PDRB Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Persentase Penduduk Miskin Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2023

Ahmad Aqil Widyantoro

ahmadaqilwidyantoro@students.undip.ac.id

Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro

Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin

esthersriastuti@lecturer.undip.ac.id

Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study analyzes the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI), Provincial Minimum Wage (UMP), and Open Unemployment Rate (TPT) on the percentage of poor population at the provincial level in Indonesia from 2019 to 2023. Using panel data covering 34 provinces for five years, this study applies the Random Effect Model (REM) as the most efficient approach, determined by the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results show that HDI has a significant negative effect on poverty rates, implying that improvements in education, health, and living standards contribute significantly to poverty. Meanwhile, PDRB, UMP, and TPT do not show statistically significant effects. These findings suggest that human development plays a more important role in alleviating poverty than economic growth or wage policies alone.

Keywords: Poverty Rate, Human Development Index, Provincial GRDP, Provincial Minimum Wage, Open Unemployment Rate

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi terhadap persentase penduduk miskin tingkat provinsi di Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan menggunakan data panel yang mencakup 34 provinsi selama lima tahun, penelitian ini menerapkan Random Effect Model (REM) sebagai pendekatan yang paling efisien, sebagaimana ditentukan oleh uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki efek negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menyiratkan bahwa peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup berkontribusi secara signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, PDRB, UMP, dan TPT tidak menunjukkan efek yang signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia memainkan peran yang lebih vital dalam mengentaskan kemiskinan daripada sekadar pertumbuhan ekonomi atau kebijakan upah.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Provinsi, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka

INTRODUCTION

Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang tidak merata antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, serta tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (poverty line), menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, inflasi yang terus meningkat, serta meningkatnya angka pengangguran juga

berkontribusi terhadap permasalahan ini. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam memperburuk kondisi kemiskinan.

Salah satu tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja ekonomi guna menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu target dari pembangunan nasional adalah menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan sendiri dianggap sebagai masalah dalam perekonomian yang perlu diatasi atau setidaknya dikurangi. Mengingat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, maka upaya penanggulangannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat serta diterapkan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Menurut Badan Pusat Statistik, (2023). Pada periode Maret 2019 hingga Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 26,42 juta orang (9,78%), yang diduga sebagai dampak awal pandemi COVID-19. Dampak pandemi semakin terlihat pada Maret 2021, ketika jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 27,54 juta orang dengan persentase 10,14%. Krisis ekonomi akibat pandemi menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan. Setelah itu, mulai terjadi pemulihan pada Maret 2022, dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,50 juta orang (9,54%). Penurunan ini didorong oleh berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan pemerintah.

Tren penurunan berlanjut hingga Maret 2023, dengan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 25,90 juta orang dan persentase mencapai 9,36%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang semakin stabil pasca-pandemi. Secara keseluruhan, grafik ini mengilustrasikan bagaimana pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan kemiskinan pada tahun 2020-2021, tetapi diikuti oleh pemulihan bertahap hingga 2023.

LITERATUREREVIEW

Kemiskinan

Chambers (dalam Nasikun) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3)

kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan yang dibagi menjadi 4 kategori. Adapun keempat kategori kemiskinan yang dimaksudkan adalah kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, kemiskinan relatif, dan kemiskinan absolut.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan ini disebabkan oleh tatanan sosial yang tidak adil yang membuat penduduk miskin tidak memiliki akses untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kondisi ini melanggengkan kemiskinan bukan karena alasan alami, tetapi karena struktur sosial yang tidak menguntungkan. Menurut Chambers (1984) kemiskinan lebih bersifat multidimensi dan menyangkut banyak aspek. Beberapa di antaranya adalah kelemahan fisik, kerentanan, keterasingan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih disebabkan oleh faktor-faktor adat dan sosial budaya yang menghalangi seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan itu merupakan fungsi kebudayaan. Artinya berdaya maupun tidak berdayanya seseorang dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial budaya seperti posisi, status, dan wawasan yang diyakini.

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diukur berdasarkan ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan dasar yang layak. Standar ini berbeda untuk setiap negara, dan kemiskinan relatif melihat pada kemampuan penduduk untuk mencapai kehidupan yang dianggap layak di negara tersebut. Menurut Bank Dunia (dalam Criswardani Suryawati, 2005), mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan).

PDRB Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah (provinsi) dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu provinsi, membandingkan kontribusi sektor-sektor ekonomi, serta sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

BPS menghitung PDRB berdasarkan tiga pendekatan utama: Pendekatan Produksi: Menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di suatu provinsi. Pendekatan

Pengeluaran: Menjumlahkan seluruh komponen pengeluaran, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan impor antarwilayah. Pendekatan Pendapatan: Menjumlahkan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, seperti upah dan gaji, surplus usaha, serta pajak tidak langsung neto.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi dasar: Dimensi Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, Dimensi Pendidikan: Diukur dengan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), Dimensi Standar Hidup Layak: Diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dengan menggunakan metode geometrik dan dinyatakan dalam angka indeks dengan skala 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, semakin baik pula tingkat pembangunan manusianya. IPM digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur kualitas hidup penduduk serta sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. UMP ditetapkan berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi.

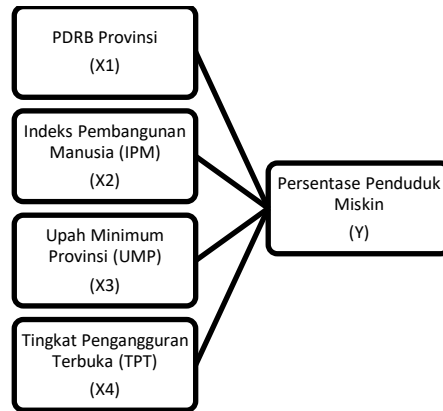
UMP dihitung berdasarkan formula yang diatur dalam peraturan pemerintah, dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Setiap provinsi wajib menetapkan UMP setiap tahun dan mengumumkannya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. BPS menggunakan data UMP sebagai salah satu indikator dalam analisis ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, serta tidak memiliki pekerjaan tetapi bersedia untuk bekerja dalam periode waktu tertentu. BPS mengukur pengangguran terbuka melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja ditambah pengangguran terbuka).

Kriteria Pengangguran Terbuka menurut BPS: Tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan sama sekali), Sedang mencari pekerjaan secara aktif, Mempersiapkan usaha baru, tetapi belum mulai

beroperasi, Tidak mencari pekerjaan, tetapi bersedia bekerja (misalnya, lulusan baru yang menunggu panggilan kerja). Pengangguran terbuka merupakan indikator utama dalam mengukur tekanan pasar tenaga kerja di suatu wilayah.



Gambar 1. Model Penelitian

METHODS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Persentase Penduduk Miskin tingkat provinsi di Indonesia tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan portal Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggabungkan data deret waktu (time series) dari tahun 2019 hingga 2023 dengan data lintas provinsi (cross section) dari 34 provinsi di Indonesia, sehingga total observasi yang diperoleh sebanyak 170 data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2012), Untuk menentukan model estimasi yang optimal, para peneliti sering menggunakan uji chow dan tes Hausman dalam analisis data panel untuk memilih antara berbagai model, termasuk model efek umum (CEM), pemodelan efek tetap (FEM), dan efek rem (REM). Hasil dari kedua tes ini digunakan sebagai dasar untuk memilih model terbaik yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel.

Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan EViews 12. Microsoft Excel digunakan untuk menginput serta merapikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, sementara EViews 12 dimanfaatkan untuk melakukan analisis statistik seperti uji korelasi dan estimasi regresi. Analisis dilakukan dengan menerapkan pendekatan ekonometrik untuk memahami sejauh mana pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TK: Tingkat Kemiskinan (%)

PDRB: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

IPM: Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

UMP: Upah Minimum Provinsi (Juta Rupiah)

TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

ε : Faktor Kesalahan (Error term)

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \dots, \beta_4$: Koefisien regresi variabel bebas

i : Provinsi ke i di Indonesia

t : Tahun ke t

RESULTS AND DISCUSSION

Analisis Prakiraan Model

Tabel 1. Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	45.88877	6.627424	6.924073	0.0000	Signifikan
PDRB	1.45E-08	4.35E-07	0.033222	0.9735	Tidak Signifikan
IPM	0.405919	0.099431	4.082405	0.0001	Signifikan
UMP	-1.98E-06	5.29E-07	-3.749331	0.0002	Signifikan
TPT	0.348921	0.180361	1.934576	0.0549	Tidak Signifikan

Tabel 2. Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	32.82443	7.088255	4.630820	0.0000	Signifikan
PDRB	5.41E-07	4.68E-07	1.165054	0.2497	Tidak Signifikan
IPM	0.347129	0.108244	3.208694	0.0017	Signifikan
UMP	4.37E-07	3.97E-07	1.100720	0.2732	Tidak Signifikan
TPT	0.058159	0.052952	1.098336	0.2742	Tidak Signifikan

Tabel 3. Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	34.52132	6.359282	5.428494	0.0000	Signifikan
PDRB	3.78E-07	4.16E-07	0.909438	0.3648	Tidak Signifikan
IPM	-0.369040	0.096493	-3.824580	0.0002	Signifikan
UMP	4.71E-07	3.52E-07	1.335161	0.1831	Tidak Signifikan
TPT	0.035275	0.049334	0.715009	0.4757	Tidak Signifikan

Penentuan Model Terbaik

Penggunaan uji chow dan tes Hausman dalam analisis data panel untuk memilih antara

berbagai model, termasuk model efek umum (CEM), pemodelan efek tetap (FEM), dan efek rem (REM).

Tabel 4. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	410.966592	(31,124)	0.0000
Cross-section Chi-square	742.704585	31	0.0000

Berdasarkan Tabel 4 di atas, nilai *Probability Cross-section F* sebesar 0.0000. Nilai tersebut kurang dari nilai signifikansi ($< 0,05$), maka model yang terpilih adalah Fixed Effect (FEM).

Tabel 5. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.763675	4	0.0673

Berdasarkan Tabel 5 di atas, nilai *Probability Cross-section Random* sebesar 0.0673. Nilai tersebut lebih dari nilai signifikansi ($> 0,05$), maka model yang terpilih adalah Random Effect (REM).

Setelah dilakukan Uji Hausman, hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.6377 (> 0.05), sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara estimator Fixed Effect dan Random Effect. Oleh karena itu, model Random Effect (REM) dinilai lebih efisien dan dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi panel pada penelitian ini. Untuk menguatkan pemilihan model tersebut, dilakukan pula Uji Lagrange Multiplier (LM) dari Breusch-Pagan.

Tabel 6. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Test	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	296.7746 (0.0000)	0.46467 5 (0.4954)	297.2393 (0.0000)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas uji LM sebesar 0.0000 (< 0.05), sehingga menolak hipotesis nol (H_0) dan menyatakan bahwa model Random Effect lebih tepat digunakan dibandingkan Common Effect Model (CEM). Berdasarkan hasil dari Uji Chow, Hausman, dan LM secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Analisis Model Terbaik

Tabel 7. Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	34.52132	6.359282	5.428494	0.0000	Signifikan
PDRB	3.78E-07	4.16E-07	0.909438	0.3648	Tidak Signifikan
IPM	-0.369040	0.096493	-3.824580	0.0002	Signifikan
UMP	4.71E-07	3.52E-07	1.335161	0.1831	Tidak Signifikan
TPT	0.035275	0.049334	0.715009	0.4757	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil pada tabel 7 dapat diketahui jika variabel UMP, PDRB, dan TPT tidak berpengaruh yang signifikan, dengan nilai $> 0,05$ atau 5% yang berarti melebihi taraf signifikansi. Namun untuk variabel IPM berpengaruh yang signifikan, dengan nilai $< 0,05$ atau 5% yang berarti kurang dari taraf signifikansi.

Pengaruh PDRB Provinsi terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Random Effect Model (REM)*, diketahui bahwa Koefisien PDRB Provinsi bernilai positif sebesar $3.78E-07$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.3648. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, PDRB Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model ini karena nilai probabilitasnya melebihi batas signifikansi umum (5%). Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Arka, (2015), yaitu PDRB per kapita secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali 2007-2013.

Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa ketika PDRB Provinsi meningkat, variabel dependen cenderung mengalami peningkatan. Pada konteks tertentu, hal ini bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu secara langsung menurunkan permasalahan sosial seperti kemiskinan atau pengangguran jika tidak dibarengi dengan distribusi hasil pembangunan yang merata. Tidak signifikan ini dapat mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif atau manfaat dari peningkatan PDRB belum dirasakan secara merata oleh masyarakat bawah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Persentase Penduduk Miskin

Hasil pengujian REM menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien negatif sebesar -0.369040 dan nilai probabilitas sebesar 0.0002, yang berarti signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM, maka variabel dependen akan cenderung menurun. Signifikansi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk., (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara indeks pembangunan manusia dengan jumlah penduduk miskin. Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa investasi pada manusia memberikan kontribusi jangka panjang terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat (UNDP, 1990). Oleh karena itu, IPM terbukti menjadi variabel yang memiliki dampak signifikan dalam model ini.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan uji REM, Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki koefisien positif sebesar

4.71E-07 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1831. Meskipun arah koefisiennya positif, UMP tidak signifikan secara statistik dalam memengaruhi variabel dependen. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk., (2022) bahwa Upah Minimum Regional (UMR) memiliki hubungan yang positif antara upah minimum regional dengan jumlah penduduk miskin. Artinya, kenaikan upah minimum belum cukup kuat secara statistik untuk memberikan pengaruh langsung terhadap penurunan (misalnya kemiskinan atau pengangguran) di daerah.

Salah satu kemungkinan penyebab tidak signifikan ini adalah karena UMP sering kali hanya berlaku efektif untuk sektor formal, sementara sebagian besar masyarakat miskin berada di sektor informal yang tidak terjangkau oleh kebijakan upah minimum. Selain itu, peningkatan UMP tanpa diiringi dengan produktivitas kerja yang memadai juga bisa berdampak netral atau bahkan kontraproduktif.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Random Effect Model (REM)*, diketahui bahwa Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai positif sebesar 0.035275 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4757, yang berarti tidak signifikan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyo dan Yusuf (2010), menemukan bahwa Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Arah positif ini menunjukkan bahwa secara teoritis, peningkatan tingkat pengangguran cenderung menaikkan nilai variabel dependen. Namun karena nilai probabilitasnya jauh di atas 0.05, maka hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik.

Hasil tidak signifikan ini mungkin terjadi karena fluktuasi TPT yang tidak langsung mencerminkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di beberapa daerah, angka pengangguran terbuka mungkin tinggi tetapi tidak selalu menunjukkan tingkat kemiskinan yang ekstrem, terutama jika terdapat sektor informal yang besar atau jika masyarakat mengandalkan sumber penghasilan non-upahan seperti usaha mikro.

CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa dari empat variabel yang dianalisis, hanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbukti secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan. Semakin tinggi IPM, yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, maka semakin rendah persentase penduduk miskin. Sebaliknya, variabel PDRB, UMP, dan TPT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan upah belum secara langsung menyentuh kelompok

masyarakat miskin, terutama yang bekerja di sektor informal. Begitu pula, tingkat pengangguran terbuka tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil kemiskinan, mengingat adanya berbagai bentuk penghidupan alternatif yang tidak tercatat secara formal.

REFERENCES

- Bao, Y., & Liao, T. (2024). Multidimensional poverty and growth: Evidence from India 1998–2021. *Economic Modelling*, 130, 106586.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2019–2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WkdVMWRYVnBkMnBvVEhKSVkyWXhNblZtTjJSbmR6MDkMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--miliar-rupiah---2022> pada tanggal 23 Maret 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2019–2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkwGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWwTISZDNabVFUMDkMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2019.html?year=2023> pada tanggal 23 Maret 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2019–2024*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi> pada tanggal 23 Maret 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2019–2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi> pada tanggal 23 Maret 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah), 2019–2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwIzI=/upah-minimum-regional-propinsi.html> pada tanggal 23 Maret 2025.
- Dewi, U., Henny, M., & Endrayani, N. K. E. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 44798.
- Efendi, B., Putri Nasution, D., Rusiadi, R., & Pratiwi, D. (2024). Teori Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Penerbit Tahta Media*. Retrieved from <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/958>
- Gujarati, Damodar, N. and Porter, D.C. (2008) *Basic Econometrics*. 5th Edition, McGraw-Hill, Boston.
- Hatta, M., & Azis, A. (2017). Analisis Faktor Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2005–2015. *Economics Bosowa*, 3(8), 16–32.
- Harianja, Y., & Findi, M. (2018). Tingkat Kemiskinan Di Pulau Papua Tahun 20011–2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 189–200.
- Himel, T. I., Hossain, M. Z., & Rahaman, K. R. (2025). Unraveling climate change vulnerability and adaptation in flood-affected communities of northern Bangladesh: A multidimensional

- poverty perspective. *Environmental Development*, 54, 101135.
- Jundi, M. A., & Poerwono, D. (2014). *Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Khasanah, W. E., Ardiantika, A., Kala, B. S., & Januarta, V. E. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia pada Tahun 2021-2023. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(3), 850-857. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i3.1442>
- Khoirudin, R., & Haerusman, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2022. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(1), 1-9.
- Nasikun. (2001). Isu dan kebijakan penanggulangan kemiskinan: Diktat kuliah Program Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Onyeyirichi, O. A., & Deepika, M. G. (2025). Rural multidimensional poverty and livelihood mix: A micro level study in Bihar, India. *Heliyon*, 11(4).
- Prastyo, A. A., & EDY YUSUF, E. Y. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Pranizty, T. P. I., & Septiani, Y. (2021). Determinasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Indonesia 2016-2020. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 7(2), 119-132.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan. (2023). *Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/942> pada tanggal 02 Maret 2025.
- Rahmawati, N., Prasetyanto, P. K., & Islami, F. S. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Regional (UMR), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 19-31.
- Sihaloho, M., Wahyuni, E. S., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. (2016). Perubahan struktur agraria, kemiskinan, dan gerak penduduk: Sebuah tinjauan historis. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 48-60.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015). Analisis pengaruh pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 44542.